

TPP Direvisi, Pemprov Dipantau BPK

SEMARANG-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng terus memantau langkah Pemprov Jateng yang merevisi tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun ini. TPP direvisi karena pemberiannya tidak didasari beban kerja, melainkan golongan.

Kepala BPK Perwakilan Jateng Hery Subowo mengaku telah melihat ada langkah-langkah perbaikan yang dilakukan Pemprov dalam pemberian TPP.

"TPP tenaga harian lepas sudah disetop, begitu juga dengan

tali asih pensiunan yang juga dihentikan. Pemprov telah mengajukan revisi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bentuknya seperti apa mari dilihat bagaimana mereka (Pemprov) memperbaikinya," kata Hery dalam Media Gathering di kantor BPK Perwakilan Jateng, Rabu (26/8).

Pegawai harian lepas yang statusnya bukan apratur sipil negara (ASN) atau PNS dinilai memang tidak semestinya mendapatkan TPP.

Karena itu, TPP harian lepas

senilai Rp 3 juta/bulan di 2015 ini sudah dihentikan sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Menurut dia, tambahan penghasilan yang sudah diberikan ke pegawai harian lepas tidak ditarik.

Tidak Fiktif

"Mereka ini kerja, sehingga (pemberian TPP) tidak fiktif. Namun, ini bentuk pemborosan dan Pemprov tidak akan melakukan lagi pada masa mendatang," ungkapnya didampingi Kepala Sub Auditoriat Jateng I Teguh.

Pemberian TPP sebelumnya menjadi sorotan anggota DPRD Jateng. Selain nilainya besar mencapai RP 1,1 triliun pada 2015, pemberian TPP juga salah sasaran. Jumlah TPP lebih besar dibanding tahun 2014, di mana APBD dialokasikan Rp 882,036 miliar.

Sebelumnya, Ketua DPRD Rukma Setyabudi menegaskan, tambahan penghasilan itu berpotensi merugikan keuangan negara. Demikian hasil konsultasi DPRD dengan BPK Perwakilan Jateng, 14 Juli lalu. (J17,J14-61)